

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan serta tugas pembantuan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018**

SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi masyarakat	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki rumah	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki rumah}}{\text{Jumlah KK Jawa Timur}} \times 100 \%$	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/Kota se Jawa Timur 3. REI	Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100 \%$ <p>Kriteria Rumah Layak Huni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan keselamatan bangunan 2. Memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik 3. Akses sanitasi yang layak 4. Akses air bersih yang layak 5. Memenuhi kecukupan luas minimum 72 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang <p>Kriteria Rumah Tidak Layak Huni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lantai perkapita kurang 8m² 2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas 3. Tidak mempunyai akses MCK 4. Bangunan tidak permanen, kayu berkualitas rendah atau atap/dinding dari bambu/rumbia 5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara 6. Tidak memiliki pembagian ruangan 7. Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengab 8. Letak rumah tidak teratur 9. Kondisi rusak 10. Belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah dari berbagai pihak, termasuk bantuan bahan bangunan rumah 	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/Kota se Jawa Timur 3. REI	Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

	Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	$\frac{(\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n-1) - (\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n)}{(\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n-1)} \times 100 \%$ <p>Kriteria Kawasan Kumuh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan Bangunan lebih dari 110 bangunan/Ha 2. Kondisi Prasarana dasar Buruk (Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Drainase, dan Persampahan) 3. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal 4. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pengembangan Kota (SPK) Kab/Kota 2. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota 3. RPIJM Kab/Kota 	Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan IPR yang telah dikeluarkan	$\frac{\text{Luas Kawasan yang peruntukannya sudah sesuai dengan IPR yang dikeluarkan}}{\text{Luas Kawasan yang telah keluar IPRnya}} \times 100 \%$ <p>Kriteria Peruntukannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. Kawasan yang sesuai dengan zona pengendalian ketat (high control zone) 3. Kawasan Strategis Provinsi (yang sesuai dengan RTRW) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/Kota se Jawa Timur 3. Peta Analog Kabupaten/Kota 	Bidang Penataan Ruang Wilayah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

